

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN PRESTASI OLAHRAGA OLEH KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN CIAMIS

Ina Lorian Lorenza¹, Aan Anwar Sihabudin²

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2}

E-mail: lorenza.ina3@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah pembinaan Prestasi Olahraga Oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Ciamis mengalami pasang surut, adanya cabang olahraga yang kurang pembinaan fisik dan strategi kemenangan, sistem administrasi terbatas dan sedikit cabang olahraga yang meraih prestasi di tingkat propinsi. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber anggaran dan minimnya tenaga terlatih yang tersertifikasi, Lemahnya pembinaan secara terstruktur (pembibitan) pada sejumlah cabang olahraga dan belum optimalnya evaluasi terhadap pembinaan yang telah dilaksanakan serta lemahnya pengawasan dalam pembinaan olahraga. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Prestasi Olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Ciamis. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik pengolahan/analisis data penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Prestasi Olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Ciamis kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hasil temuan penelitian, seperti kurangnya dukungan sumber daya, anggaran, pembinaan secara khusus, terstruktur seperti fisik dan strategi kemenangan, evaluasi, sistem administrasi dan data/dokumen pembinaan atlet dan lemahnya pengawasan pada pelatih setiap cabang olahraga.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Pembinaan.*

ABSTRACT

The background of this research is that the development of sports achievements by the Indonesian National Sports Committee in Ciamis Regency has experienced ups and downs, the existence of sports that lack physical development and winning strategies, a limited administrative system and few sports that achieve achievements at the provincial level. This is due to limited budget resources and the lack of certified trained personnel, weak structured coaching (nursery) in a number of sports and not yet optimal evaluation of the coaching that has been

carried out as well as weak supervision in sports coaching. The purpose of this study is to determine the implementation of local government policies in the development of sports achievements by the Indonesian National Sports Committee in Ciamis Regency. This research design uses qualitative research methods, data collection techniques, namely interviews, observation and documentation, data processing/analysis techniques in this research, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the research that the implementation of local government policies in the development of sports achievements by the Indonesian National Sports Committee in Ciamis Regency is less than optimal. This is indicated by the results of research findings, such as the lack of support for resources, budgets, special, structured coaching such as physical and winning strategies, evaluations, administrative systems and data/documents for coaching athletes and weak supervision of coaches for each sport.

Keywords: *Implementation, Policy, Coaching.*

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan meliputi pemekaran fasilitas olahraga pembinaan atlet berpotensi pada tiap-tiap cabang olahraga, peningkatan dan pembinaan sistem kepelatihan yang sesuai kemajuan perkembangan ilmu teknologi terbaru dibidang olahraga, pengelolaan manajemen organisasi olahraga secara terstruktur (Nugroho, 2016:1).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 bahwa arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan pelaksanaan pembangunan dari RPJPD periode/tahap keempat (2019-2024), prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan keempat diantaranya adalah pengembangan pembinaan profesionalisme atlet daerah. Strategi pemerintah daerah yaitu meningkatkan kapasitas atlet olahraga dan pelaku seni, budaya, sementara arah kebijakan yaitu meningkatkan pemasyarakatan dan pembinaan atlet olahraga.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang terkait anggaran dan metoda atau strategi yang akan dijalankan, dengan membuat rancang bangun program untuk empat tahun ke depan. (Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024).

Oleh karena itu dalam pembinaan olahraga di Ciamis diharapkan ada riset pembinaan yang jelas sasarannya mengingat banyak atlet muda potensial yang berprestasi. Untuk itu telah melakukan berbagai upaya pembinaan terhadap atlet di berbagai cabang (cabang olahraga) dalam rangka menghadapi Porda Jabar tahun 2022 mendatang. KONI melakukan pembinaan yang unggul, sesuai dengan potensi atlet yang ada di Kabupaten Ciamis, sehingga bisa mendongkrak prestasi di Porda 2022 mendatang. KONI Ciamis berkordinasi bersama dengan seluruh pelatih atau pembina seluruh cabang. Sehingga, pembinaan yang bersinergi akan menghasilkan atlet-atlet handal dan mampu berprestasi pada berbagai ajang kejuaraan. Salah satu cabang olahraga yang mendapat prestasi di ajang Porda Jabar yaitu dari cabang olahraga Voli Pantai.

Menurut Nugroho (2016:1) Pembinaan atlet berprestasi dapat dilakukan dengan pemberian penghargaan, penyediaan sarana prasarana olahraga, dan pelatihan peningkatan SDM olahraga disertai pemenuhan anggaran untuk Pemkab. Pembinaan pelatih dilakukan dengan pemenuhan fasilitas kepelatihan olahraga dan apresiasi terhadap pelatih berprestasi dan pelatih berserifikat provinsi, nasional, serta internasional.

Winarno, (2016:102) mengatakan:

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-

tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut, Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. (Yuliani, 2015:256).

Jika semua kepentingan benar-benar diperhitungkan dan diakomodasi maka suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan relatif berhasil. Suatu kebijakan juga relatif mudah diimplementasikan jika kebijakan tersebut memberikan manfaat kolektif dan dapat langsung dirasakan daripada kebijakan yang hanya memberikan manfaat kepada kelompok tertentu dan hasilnya baru bisa dinikmati dalam jangka panjang. Selain itu, semakin luas derajat perubahan yang diupayakan oleh suatu kebijakan maka semakin sulit kebijakan tersebut diimplementasikan.

Pembinaan Prestasi Olahraga Oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Di Kabupaten Ciamis dalam

penyelenggaraan pada Tahun 2017 mengalami pasang surut dari segi anggaran, dengan minimnya anggaran KONI pada Tahun 2017 membuat sejumlah atlet yang berprestasi di Kabupaten Ciamis terancam terbengkalai. KONI menilai dengan anggaran minim tersebut tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beberapa program dan pembinaan untuk 23 cabang olahraga di Ciamis. dengan kondisi anggaran tersebut sangat berat untuk menghadapi pra kualifikasi untuk Porda 2018 di Bogor (KONI Ciamis, 2017). Dengan dana yang minim ini kemungkinan tidak akan tercukupi, dan terpaksa ada program yang akan diamputasi. Termasuk salah satu program beasiswa bagi siswa berprestasi untuk tahun 2017 terpaksa ditangguhkan.

Pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Ciamis memberikan beasiswa bagi atlet yang berprestasi pada Pekan Olahraga Daerah (PORDA) XII Jawa BARAT, yang diselenggarakan di Kabupaten Bogor 2018. Penyerahan beasiswa khusus untuk pelajar dan mahasiswa, sedangkan atlet lain mendapatkan uang *kadeudeuh*. Beasiswa untuk atlet berprestasi yang baru pertama kali dilakukan itu langsung diserahkan oleh Wakil Bupati Ciamis, disaksikan oleh Ketua KONI Ciamis serta Ketua dan Pengurus cabang olahraga.

Hasil penelitian Ernitaslim. (2017) bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human*

resources) yakni para pelatih dan pengelola maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*) yaitu anggaran, fasilitas dan wewenang

Oleh karena itu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Ciamis selaku organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari permasalahan dan ditemukan fenomena yang menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga belum optimal, hal ini ditunjukkan dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber anggaran dan minimnya tenaga terlatih yang tersertifikasi sehingga belum semua cabang olahraga mendapatkan pembinaan khusus secara optimal
2. Lemahnya pembinaan secara terstruktur (pembibitan) pada sejumlah cabang olahraga seperti kurangnya pembinaan fisik maupun jasmani serta pembinaan strategi untuk mencapai kemenangan
3. Belum optimalnya evaluasi terhadap pembinaan yang telah dilaksanakan, seperti sistem administrasi KONI sehingga

data/dokumen mengenai pembinaan atlet sangat terbatas padahal dokumen tersebut merupakan hal penting untuk menggambarkan kemajuan/perkembangan atlet.

4. Lemahnya pengawasan dalam pembinaan olahraga terutama pada pelatih masih-masing cabang olahraga sehingga hanya sedikit cabang olahraga yang meraih prestasi di tingkat propinsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Prestasi Olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Ciamis?”.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas yang menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Sunarti (2016:790) bahwa:

Hakekat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Menurut Goggin et,al dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015: 89), faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah :

Kebijakan diasumsikan sebagai suatu “pesan” dari pemerintah federal (pusat) kepada pemerintah daerah, keberhasilan implementasi tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok :

1. Isi kebijakan (*the content of the policy message*),
2. Format kebijakan (*The from of the policy message*)
3. Reputasi aktor (*the reputation of the communicator*)

Berdasarkan uraian diatas bahwa isi kebijakan meliputi sumberdaya, manfaat kebijakan, serta keterlibatan publik. Format kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan (*policy clarity*), konsistensi kebijakan (*policy consistency*), frekuensi serta penerimaan isi kebijakan (*Receipt of massage*). Sedangkan *reputation of commincator* terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah.

Wahab, (2012: 64-65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa:

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya.

Menurut Wahab (Gifari dan Vestikowati, 2016:39) bahwa kebijakan itu adalah:

Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Waluyo, (2007:49) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar

bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

Pemerintah Daerah merupakan suatu sub sistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana tugas-tugas negara/ pemerintah diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional.

Menurut Slamet (2010 : 130) bahwa :

Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya

perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Pembinaan juga merupakan suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya.

Dengan demikian bahwa pembinaan yaitu usaha yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk membimbing dan mengarahkan kearah yang lebih baik dengan cara-cara baru dan menerapkannya ke dalam praktek yang dilakukan dalam organisasi.

Lutan, (2013:57) mengemukakan : “Prestasi olahraga sendiri merupakan suatu tolok ukur kesuksesan pembinaan suatu cabang olahraga yang dikembangkan atau dibina dengan baik”.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena penelitian ini untuk mempertegas permasalahan sehingga diketahui cara pemecahan masalahnya. Dalam hal ini masalahnya sudah jelas, akan tetapi langkah yang terpenting adalah penegasan konsep-konsep yang relevan.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi wawancara,

observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan/ analisis data penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan *kesimpulan*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi kebijakan (*the content of the policy message*)

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi isi kebijakan (*the content of the policy message*) bahwa KONI Kabupaten Ciamis dalam pembinaan prestasi olahraga telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembinaan prestasi olahraga tersebut. KONI dalam melakukan pembinaan terhadap para atlet berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan dalam ajang Porda berharap dalam meraih juara dan medali emas, hal ini yang menjadi sasaran dari KONI Kabupaten Ciamis. Kemudian KONI Kabupaten Ciamis telah memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Ciamis dengan dilaksanakannya pembinaan prestasi olahraga, manfaat tersebut seperti dapat mengangkat nama baik daerah di tingkat nasional maupun internasional mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan khususnya daerah dan bangsa.

Selanjutnya KONI Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pembinaan prestasi olahraga belum optimal dalam mengawasi kegiatan tersebut, pihak-pihak yang terlibat masih belum dapat mengawasi kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti belum

optimalnya komunikasi dan koordinasi KONI dengan pihak-pihak yang terlibat dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Pengambilan keputusan telah dilakukan oleh KONI Kabupaten Ciamis dalam membina prestasi atlet untuk menghadapi kegiatan dalam Porda. Keputusan yang telah diambil oleh pihak KONI seperti verifikasi kesiapan cabang olahraga, peningkatan sdm kepelatihan dan peningkatan dukungan fasilitas latihan, peningkatan komunikasi dengan pengprov cabang olahraga, upaya-upaya non teknis untuk cabang olahraga penilaian dan peningkatan motivasi atlet dan pelatih

Terkait dengan dukungan sumber daya dalam pembinaan prestasi olahraga ini, KONI Kabupaten Ciamis masih belum mendapat dukungan sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia berupa kemampuan dan pemahaman pengurus yang belum memadai, dukungan sumber anggaran yang masih relatif minim dan dukungan sarana dan fasilitas olahraga yang belum memadai sehingga fasilitas cabor-cabor belum terlihat merata.

Implementasi kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahanyang diharapkan terjadi.

Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan Mulyadi (2015:12), bahwa:

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas bahwa dalam isi kebijakan berupaya untuk menunjukan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan, derajat perubahan yang ingin dicapai.

Format kebijakan (*the from of the policy message*)

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Format kebijakan (*the from of the policy message*) bahwa pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dan KONI dalam menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan pembinaan prestasi olahraga telah memiliki kejelasan informasi untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu KONI sebagai pelaksana kebijakan dalam pencapaian sasaran dan kebijakan

dimaksud, KONI Kabupaten Ciamis melaksanakannya dalam bentuk Program / kegiatan. Kemudian KONI Kabupaten Ciamis telah melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan prestasi olahraga secara konsisten dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan rutin kesekretariatan, kegiatan rutin perbendaharaan dan kegiatan persiapan dan pelaksanaan Porda.

KONI Kabupaten Ciamis dalam menyampaikan informasi dari kebijakan telah dilaksanakan dengan rutin. Informasi yang disampaikan tersebut berupa maksud dan tujuan dari kebijakan pemerintah tersebut sehingga pengetahuan dan pemahaman para atlet dalam meningkat dan memotivasi atlet untuk mampu meraih prestasi dalam bidang olahraga. KONI Kabupaten Ciamis dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan prestasi olahraga telah dilaksanakan secara terbuka dan transparan sehingga akuntabilitas KONI dapat meningkat, keterbukaan menjadi hal yang sangat penting, oleh karena itu keterbukaan kebijakan dalam pembinaan prestasi olahraga telah berikan oleh KONI yang mampu meningkatkan nama baik organisasi.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas yang menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana

yang diharapkan. Winarno, (2016:102) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-onsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu telah diimplementasikan dengan sangat baik, sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Reputasi aktor (*the reputation of the communicator*)

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Reputasi aktor (*the reputation of the communicator*) bahwa KONI dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan prestasi olahraga telah mendapat legitimasi dari pemerintah dengan diterbitkannya aturan perundang-undangan. Kemudian KONI Kabupaten Ciamis telah mendapat kepercayaan dari pemerintah daerah

untuk membina prestasi olahraga, kepercayaan ini diberikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya KONI Kabupaten Ciamis untuk menjaga nama baik dan kredibilitasnya dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan programnya dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku sehingga sesuai dengan harapan dari pemerintah dan masyarakat.

Peran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dimiliki oleh aktor tersebut, aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang tinggi tetapi memiliki kekuatan (*power*) yang rendah diklasifikasikan sebagai Subyek (*Subjects*). Aktor ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan aktor lainnya. Aktor ini sering bisa sangat membantu sehingga hubungan dengan aktor ini harus tetap dijaga nama baik.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Horn (Tahir, 2014:55), bahwa:

Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya

ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada dilingkungannya. Keterlibatan aktor dalam proses kebijakan tidaklah bebas Nilai atau bebas dari kepentingan. Nilai adalah sesuatu yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Para aktor baik yang berasal dari kalangan pemerintah atau non pemerintah terlibat dengan persoalan nilai dalam proses kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Prestasi Olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Ciamis, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Prestasi Olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Ciamis masih dilaksanakan kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya beberapa hasil temuan penelitian, seperti belum adanya dukungan sumber daya yang dimiliki KONI Kabupaten Ciamis yang disebabkan oleh keterbatasan sumber anggaran dan minimnya tenaga terlatih yang tersertifikasi. Sehingga belum semua cabang olahraga mendapatkan pembinaan khusus secara optimal. Belum optimalnya pembinaan secara terstruktur pada sejumlah cabang olahraga seperti kurangnya pembinaan

fisik maupun jasmani serta pembinaan strategi untuk mencapai kemenangan yaitu kurangnya kemampuan pelatih. Belum optimalnya evaluasi terhadap pembinaan yang telah dilaksanakan, yang disebabkan sistem administrasi KONI belum tersusun dengan baik. Sehingga data/dokumen mengenai pembinaan atlet sangat terbatas. Padahal dokumen tersebut merupakan hal penting untuk menggambarkan kemajuan/ perkembangan atlet dan lemahnya pengawasan dalam pembinaan olahraga terutama pada pelatih masih-masing cabang olahraga. Sehingga hanya sedikit cabang olahraga yang meraih prestasi di tingkat provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernitaslim. (2017). *Implementasi Kebijakan Peningkatan Prestasi Atlet Pusat Pembinaan Dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) Dinas Dan Olahraga Daerah Propinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 12, Desember 2017
- Gifari Fajar, Endah Vestikowati. (2015). *Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) Di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis*. Jurnal Moderat Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol 1 No 1 (2015)
- Lutan, Rusli. (2013). *Self Esteem: Landasan Kepribadian*. Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan. Dirjen Olahraga Depdiknas
- Mulyadi, Deddy, (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024
- Purwanto Agus, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Slamet. (2010). *Belajar & faktor – faktor yang mempengaruhi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sunarti Neti. (2016). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan*. Jurnal Moderat Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol 2 No 2 Mei 2016
- Tahir Arifin, (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wahab, Abdul Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan*

- Implementasi Dalam kompratif), Yogyakarta : CAPC*
Pelaksanaan Otonomi (Center Of Academic Publishing
Daerah. Bandung: Mandarmaju Service)
- Nugroho Waskito Budi. (2016). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Olahraga Prestasi (Studi Deskriptif Tentang Pembinaan Atlet, Pelatih, dan Pengurus Organisasi Olahraga di Kabupaten Sukoharjo)*. Progd. Ilmu Keolahragaan-A.1214080383-2016
- Yuliani Dini. (2015). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran*. Jurnal Moderat Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol 1 No 2 (2015)
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi (teori, proses dan studi kasus)*